p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Kepiting Bakau (*Scylla* spp.) Melalui Pendekatan MACTOR di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan

Policy Implementation of Mud Crab (Scylla spp.*) Management Through The MACTOR Approach In Sinjai Regency, South Sulawesi*

***Ahmad Muyassar[1], Fredinan Yulianda[2], Zairion[2], dan Taryono[2]**

[1]Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan Lautan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University
Kampus IPB Darmaga, Jl. Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia

[2]Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, IPB University
Kampus IPB Darmaga, Jl. Agatis, Babakan, Kec. Dramaga, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Indonesia

ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 1 September 2025
Perbaikan naskah: 17 Juni 2026
Disetujui terbit : 29 Juli 2026

*Korespodensi penulis:
Email: yassar_ahmad@kkp.go.id

DOI: http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v16i2.19593

CC BY NC SA

ABSTRAK

Pengelolaan kepiting bakau (*Scylla* spp.) melibatkan berbagai pemangku kepentingan dengan kewenangan, kepentingan, dan tingkat pengaruh yang berbeda sehingga keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh regulasi, tetapi juga oleh hubungan antaraktor. Namun, informasi mengenai konfigurasi pengaruh, ketergantungan, serta potensi kerja sama dan konflik antaraktor dalam pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai masih terbatas.Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh, ketergantungan, mobilisasi, serta pola konvergensi dan divergensi antar pemangku kepentingan sebagai dasar pengelolaan yang kolaboratif. Penelitian dilaksanakan pada April–Mei 2025 dengan melibatkan 16 responden yang mewakili delapan kelompok pemangku kepentingan. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner dan wawancara terstruktur menggunakan teknik *purposive sampling*, kemudian dianalisis menggunakan MACTOR (*Matrix of Alliances, Conflicts, Tactics, Objectives, and Recommendations*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pejabat Karantina dan Pengawas Perikanan merupakan aktor dengan pengaruh tertinggi, sedangkan pengumpul memiliki tingkat ketergantungan tertinggi terhadap sistem. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pengawas Perikanan, dan Pejabat Karantina berperan sebagai *policy driver*, sementara Dinas Perikanan Kabupaten dan Penyuluh Perikanan berfungsi sebagai *relay actors*. Perlindungan habitat merupakan tujuan pengelolaan dengan tingkat mobilisasi tertinggi. Konvergensi terkuat terjadi antara Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Dinas Perikanan Kabupaten, sedangkan divergensi sistem relatif rendah (3,9%) dan terutama dipengaruhi oleh perbedaan posisi pengumpul terhadap penguatan regulasi. Temuan ini menunjukkan bahwa efektivitas implementasi kebijakan lebih ditentukan oleh konfigurasi hubungan antaraktor daripada keberadaan regulasi semata. Oleh karena itu, strategi pengelolaan perlu menempatkan pemerintah provinsi dan kabupaten sebagai *policy champion*, memperkuat koordinasi lintas lembaga, serta mengintegrasikan perlindungan habitat dengan mekanisme pengendalian rantai pemasaran yang melibatkan pengumpul untuk menjaga keberlanjutan sumber daya sekaligus keberlanjutan usaha masyarakat pesisir.

Kata Kunci: kepiting bakau; MACTOR; pemangku kepentingan; Sinjai, tata kelola kolaboratif

ABSTRACT

Mud crab (Scylla spp.) management involves multiple stakeholders with different authorities, interests, and levels of influence. Consequently, the effectiveness of policy implementation depends not only on the existence of regulations but also on stakeholder interactions. However, information regarding stakeholder influence, dependency, and the potential for collaboration and conflict in mud crab management in Sinjai Regency remains limited. This study aimed to analyze stakeholder influence, dependency, mobilization, and patterns of convergence and divergence as a basis for collaborative management. The research was conducted from April to May 2025 and involved 16 respondents representing eight stakeholder groups. Data were collected through field observations, structured questionnaires, and interviews, using purposive sampling, and analyzed using the MACTOR (Matrix of Alliances, Conflicts, Tactics, Objectives, and Recommendations) method. The results showed that Quarantine Officers and Fisheries Inspectors were the most influential stakeholders, while collectors exhibited the highest level of dependency within the management system. The Provincial Marine and Fisheries Office, Fisheries Inspectors, and Quarantine Officers functioned as policy drivers. In contrast, the Regency Fisheries Office and Fisheries Extension Officers served as relay actors linking policy with field implementation. Habitat protection emerged as the management objective with the highest level of stakeholder mobilization. The strongest convergence was identified between the Provincial Marine and Fisheries Office and the Regency Fisheries Office. At the same time, the overall level of stakeholder divergence was relatively low (3.9%) and was primarily associated with collectors' differing views on strengthening fisheries regulations. These findings indicate that the effectiveness of mud crab management policy implementation is determined more by stakeholder configurations and interactions than by regulations alone. Therefore, management strategies should position the provincial and regency governments as policy champions, strengthen cross-institutional coordination, and integrate habitat protection with supply-chain-based control mechanisms involving collectors to ensure sustainable mud crab resources and the long-term livelihoods of coastal communities.

Keywords: collaborative governance, MACTOR, mud crab, Sinjai, stakeholders

PENDAHULUAN

Kepiting bakau (*Scylla* spp.) merupakan salah satu biota perairan pesisir yang hidup berasosiasi erat dengan ekosistem mangrove dan umumnya menghuni perairan estuari, daerah intertidal, serta habitat bersubstrat lumpur (Le Vay, 2001; Viswanathan *et al*., 2019; Karniati *et al*., 2021). Kepiting bakau memiliki nilai ekonomi yang tinggi dan salah satu sumber penghidupan utama

masyarakat pesisir (Apine *et al*., 2019; Cuinhane *et al*., 2024). Produksi kepiting bakau di Indonesia pada tahun 2022 mencapai 14.214 ton dengan nilai ekonomi sebesar Rp 986 miliar, Provinsi Sulawesi Selatan menempati urutan ketiga sebagai produsen kepiting bakau nasional dengan jumlah produksi sebesar 1.571 ton (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2023). Kabupaten Sinjai menghasilkan kepiting bakau sebesar 108,59 ton pada tahun 2022 dan menunjukkan tren peningkatan produksi rata-rata sebesar 46,69% sejak tahun 2019 (Dinas Perikanan Sinjai, 2022). Peningkatan permintaan pasar terhadap kepiting bakau mendorong peningkatan intensitas penangkapan dan memperbesar tekanan pemanfaatan terhadap populasi di alam (Yunus & Siahainenia 2019).

Peningkatan produksi dan permintaan pasar tehadap kepiting bakau mendorong intensifikasi pemanfaatan sumber daya di berbagai wilayah pesisir, temasuk Kabupaten Sinjai. Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan adanya indikasi tekanan pemanfaatan yang ditandai oleh dominasi hasil tangkapan berukuran kecil, tertangkapnya individu yang belum layak tangkap, serta masih ditemukannya kepiting betina bertelur dalam hasil tangkapan nelayan (Chadijah, 2011; Alamsyah *et al*., 2017; Riyanto *et al*., 2025). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberlanjutan sumber daya kepiting bakau tidak hanya ditentukan oleh kondisi ekologis, tetapi juga oleh efektivitas sistem pengelolaan yang mengatur perilaku pemanfaatan sumber daya.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan berbagai instrumen kebijakan untuk mengendalikan pemanfaatan kepiting bakau, termasuk Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus* spp.), Kepiting (*Scylla* spp.) dan Rajungan (*Portunus* spp.), yang mengatur ukuran minimum kepiting yang dapat ditangkap, larangan penangkapan kepiting dalam kondisi bertelur, serta penggunaan alat tangkap yang bersifat pasif dan ramah lingkungan. Secara normatif, kebijakan tersebut telah menyediakan kerangka pengelolaan yang jelas. Namun, keberhasilan implementasi kebijakan tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi, melainkan juga kemampuan berbagai aktor untuk berkoordinasi, membangun komitmen bersama, serta menjalankan fungsi pengawasan dan kepatuhan secara efektif.

Dalam perspektif tata kelola sumber daya alam, keberhasilan pengelolaan tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab satu institusi, tetapi merupakan hasil interaksi berbagai aktor yang memiliki kepentingan, kewenangan, sumber daya, dan tingkat pengaruh yang berbeda (Emerson *et al*., 2011; Ostrom, 2014). Konsep *collaborative governance* menekankan bahwa penyelesaian permasalahan sumber daya memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat, sektor usaha, dan organisasi masyarakat sipil dalam suatu proses pengambilan keputusan yang saling bergantung dan berbasis kolaborasi (Emerson *et al*., 2011). Bryson *et al*., (2011) juga menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh konfigurasi pemangku kepentingan, termasuk tingkat pengaruh, kepentingan, ketergantungan, dan hubungan antaraktor yang terlibat dalam suatu sistem pengelolaan.

Kondisi pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai menunjukkan karakteristik multiaktor yang melibatkan pemerintah pusat, pemerintah daerah, aparat pengawas perikanan, Badan Karantina Indonesia, penyuluh perikanan, kelompok masyarakat, nelayan, dan pengumpul. Masing-masing aktor memiliki mandat, kepentingan, dan kapasitas yang berbeda dalam implementasi kebijakan. Perbedaan tersebut berpotensi menghasilkan dukungan maupun resistensi terhadap tujuan pengelolaan. Pada praktiknya, efektivitas implementasi kebijakan sering kali dipengaruhi oleh lemahnya koordinasi kelembagaan, ketidaksinkronan kewenangan, perbedaan prioritas antaraktor, serta ketergantungan yang tinggi antara pelaku pemanfaatan dan pelaku pemasaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa tantangan utama pengelolaan kepiting bakau tidak hanya terletak pada aspek eksploitasi sumber daya, tetapi juga pada aspek tata kelola dan hubungan antaraktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan.

Meskipun berbagai penelitian di Kabupaten Sinjai telah membahas aspek bioekologi, karakteristik habitat, struktur populasi, dan tingkat pemanfaatan kepiting bakau, informasi mengenai dimensi tata kelola masih sangat terbatas. Hingga saat ini belum tersedia bukti empiris mengenai konfigurasi kekuatan aktor dalam implementasi kebijakan pengelolaan kepiting bakau, belum diketahui aktor yang berperan sebagai *policy driver* maupun aktor yang berpotensi menjadi *bottleneck* dalam proses implementasi kebijakan, serta belum teridentifikasi pola koalisi, konvergensi, dan divergensi kepentingan antaraktor yang dapat memengaruhi keberhasilan pengelolaan. Kesenjangan pengetahuan tersebut menyebabkan perumusan strategi pengelolaan

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

masih lebih banyak berfokus pada aspek biologis dan teknis, sementara faktor kelembagaan yang menentukan efektivitas implementasi kebijakan belum dipahami secara memadai. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis peran, pengaruh, ketergantungan, tingkat mobilisasi, serta pola konvergensi dan divergensi antara pemangku kepentingan dalam pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai melalui pendekatan analisis MACTOR untuk mengidentifikasi posisi strategis, hubungan kepentingan, potensi aliansi dan potensi konflik antaraktor sebagai dasar perumusan strategi pengelolaan yang kolaboratif dan berkelanjutan.

Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Sinjai Sulawesi Selatan pada bulan April sampai Mei 2025. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur menggunakan kuesioner kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam pengelolaan kepiting bakau. Penentuan responden dilakukan secara *purposive sampling* karena penelitian ini bertujuan mengidentifikasi hubungan pengaruh, ketergantungan, dan posisi strategis aktor dalam sistem pengelolaan, sehingga diperlukan informan yang memiliki pengetahuan, kewenangan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan maupun implementasi pengelolaan kepiting bakau (Hikmawati, 2020). Sebanyak 16 responden dipilih untuk mewakili delapan kelompok pemangku kepentingan yang teridentifikasi dalam sistem pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai (Tabel 1). Jumlah responden tidak ditujukan untuk mewakili populasi secara statistik, melainkan untuk merepresentasikan posisi kelembagaan setiap aktor yang memiliki pengaruh terhadap pengelolaan sumber daya.

Pemilihan responden pada setiap kelompok aktor didasarkan pada kriteria: (1) memiliki kewenangan formal dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan program yang berkaitan dengan pengelolaan kepiting bakau; (2) memiliki pengalaman dan pengetahuan mengenai pemanfaatan, pengawasan, pembinaan, atau pemasaran kepiting bakau; serta (3) terlibat secara langsung dalam implementasi kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan. Pada kelompok pemerintah dan lembaga formal, responden merupakan pejabat atau pelaksana teknis yang menangani bidang terkait. Pada kelompok nelayan dan pengumpul, responden dipilih berdasarkan pengalaman usaha dan keterlibatan aktif dalam kegiatan penangkapan maupun perdagangan kepiting bakau.

Penentuan tujuan pengelolaan yang digunakan dalam analisis MACTOR dilakukan melalui telaah regulasi, kajian literatur, dan validasi bersama informan kunci. Tujuan yang akan dicapai mencakup beberapa aspek diantaranya ekologi, ekonomi, sosial, dan kelembagaan (Tabel 2). Regulasi yang menjadi rujukan utama dalam penentuan tujuan yaitu Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 sebagaimana diubah melalui Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengelolaan Lobster, Kepiting, dan Rajungan, serta kebijakan pengelolaan perikanan berkelanjutan yang menekankan aspek ekologi, ekonomi, sosial, dan tata kelola. Selain itu, tujuan pengelolaan juga mengacu pada prinsip pengelolaan perikanan berkelanjutan yang dikemukakan oleh FAO (2021), pendekatan ekosistem untuk pengelolaan perikanan (*Ecosystem Approach to Fisheries Management*), serta hasil identifikasi isu pengelolaan yang berkembang di Kabupaten Sinjai.

Tabel 1. Aktor (*Stakeholder*) dalam Pengelolaan Kepiting Bakau.

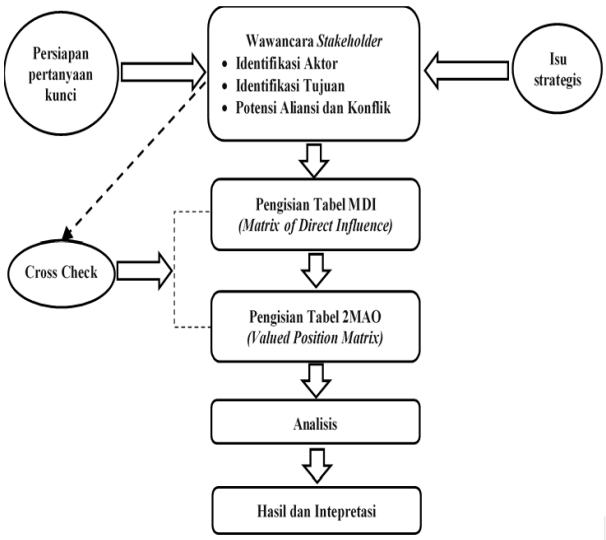
No.	Aktor/Kode	Deskripsi peran
1.	Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi **(DKP_Prov)**	Pengelolaan penangkapan ikan di wilayah laut sampai 12 mil, Penerbitan izin usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi serta memberdayakan nelayan kecil dan pembudidaya ikan kecil
2.	Dinas Perikanan Kabupaten **(Diskan)**	Pemberdayaan nelayan kecil dalam daerah kabupaten/kota serta Pemberdayaan usaha pembudidaya ikan kecil dan Pengelolaan pembudidaya ikan kecil
3.	Pengawas Perikanan **(PgwasPrikn)**	Pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan, Penegakan hukum di sektor kelautan dan perikanan serta Pembinaan POKMASWAS
4.	Penyuluh Perikanan **(PyluhPrikn)**	Penyelenggaraan penyuluhan perikanan serta Peningkatan kapasitas SDM masyarakat kelautan dan perikanan
5.	Pejabat Karantina **(Pkarantina)**	Melaksanakan tugas pemerintahan dalam bidang karantina
6.	Kelompok Swadaya Masyarakat **(KPSDA_ACI)**	Pemberdayaan nelayan/ kelompok nelayan, Rehabilitasi mangrove dan Pengembangan ekowisata mangrove
7.	Pelaku Usaha **(Pengumpul)**	Menampung dan membeli kepiting bakau hasil tangkapan nelayan
8.	Nelayan **(Nlyn_Kpitg)**	Melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Tabel 2. Tujuan Pengelolaan Kepiting Bakau.

No	Tujuan Pengelolaan/Kode	Penjelasan
1.	Menjaga sumber daya perikanan_ **Sumber daya**	Pengaturan musim tangkap, ukuran tangkap, pembatasan alat tangkap dan pelarangan penangkapan kepiting betina bertelur.
2.	Melindungi habitat_**Habitat**	Perlindungan dan rehabilitasi ekosistem mangrove, pengendalian alih fungsi lahan, pengelolaan limbah dan pencemaran perairan.
3.	Meningkatkan teknologi/inovasi_**Tekno/ Inov**	Pengembangan budidaya kepiting bakau (*sylvofishery*, *softshell*, pembesaran), inovasi teknik penangkapan ramah lingkungan.
4.	Meningkatkan pendapatan_***Income***	Memperluas akses pasar, menambah nilai produk melalui pengolahan dan memperbaiki rantai pasok.
5.	Program pendidikan dan penyuluhan_ ***Education***	Pelatihan dan penyuluhan mengenai aturan penangkapan, teknik budidaya ramah lingkungan, konservasi habitat dan penggunaan alat tangkap yang selektif.
6.	Keterlibatan pemangku kepentingan_ ***Stakeholdr***	Peningkatan partisipasi masyarakat nelayan, kelompok pengawas, LSM, perguruan tinggi dan swasta dalam pengelolaan, pengawasan serta rehabilitasi habitat.
7.	Memperkuat tata kelola dan kapasitas lembaga_**Tatakelola**	Koordinasi antara lembaga dan keterlibatan Masyarakat lokal
8.	Memperkuat Kebijakan dan regulasi_ **Kebijakan**	Peningkatan pengawasan dan penegakan hukum, memperluas kerjasama antara *stakeholder*.

Analisis pemangku kepentingan dilakukan menggunakan metode MACTOR *(Matrix of Alliance, Conflicts, Tactics Objective and Recommendation)* untuk mengidentifikasi struktur pengaruh, ketergantungan, konvergensi, dan divergensi antaraktor dalam suatu sistem. Metode ini memungkinkan identifikasi aktor kunci, aktor dominan, aktor yang bergantung, serta potensi koalisi dan konflik yang dapat memengaruhi implementasi kebijakan. Penilaian pengaruh langsung antaraktor dilakukan menggunakan *Matrix of Direct Influences* (MDI) dengan skala 0-4, dimana skor 0 menunjukkan tidak ada pengaruh, skor 1 menunjukkan pengaruh lemah, skor 2 menunjukkan pengaruh sedang, skor 3 menunjukkan pengaruh kuat, dan skor 4 menunjukkan pengaruh sangat kuat terhadap keberlangsungan aktivitas aktor lain.

Posisi aktor terhadap tujuan dinilai melalui matriks 2MAO dengan skala -4 sampai +4, nilai positif menunjukkan dukungan terhadap tujuan, nilai negatif menunjukkan penolakan atau potensi konflik terhadap tujuan, sedangkan nilai nol menunjukkan posisi netral. Matriks MDI selanjutnya diolah menjadi *Matrix of Direct and Indirect Influences* (MDII), untuk memperoleh nilai pengaruh dan ketergantungan total setiap aktor. Matriks 2MAO diolah menjadi matriks 3MAO untuk mengidentifikasi tingkat mobilisasi aktor terhadap tujuan pengelolaan, yang kemudian digunakan untuk menghasilkan matriks konvergensi dan divergensi yang menggambarkan tingkat kesamaan maupun perbedaan kepentingan antaraktor. Tahapan analisis MACTOR dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan analisis MACTOR.
(Sumber: Modifikasi Fauzi, 2019).

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN KEPITING BAKAU (*Scylla* spp.)

Pengaruh dan Peran Antaraktor

Pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai melibatkan berbagai pihak yang masing-masing memiliki kepentingan, kewenangan dan tugas yang berbeda-beda. Hasil *Matrix of Direct Influences* (MDI) menggambarkan kekuatan pengaruh langsung antaraktor. Matiks ini menghasilkan *Matrix of Direct and Indirect Influences* (MDII) yang menggambarkan pengaruh dan ketergantungan langsung maupun tidak langsung antaraktor (Gambar 2).

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

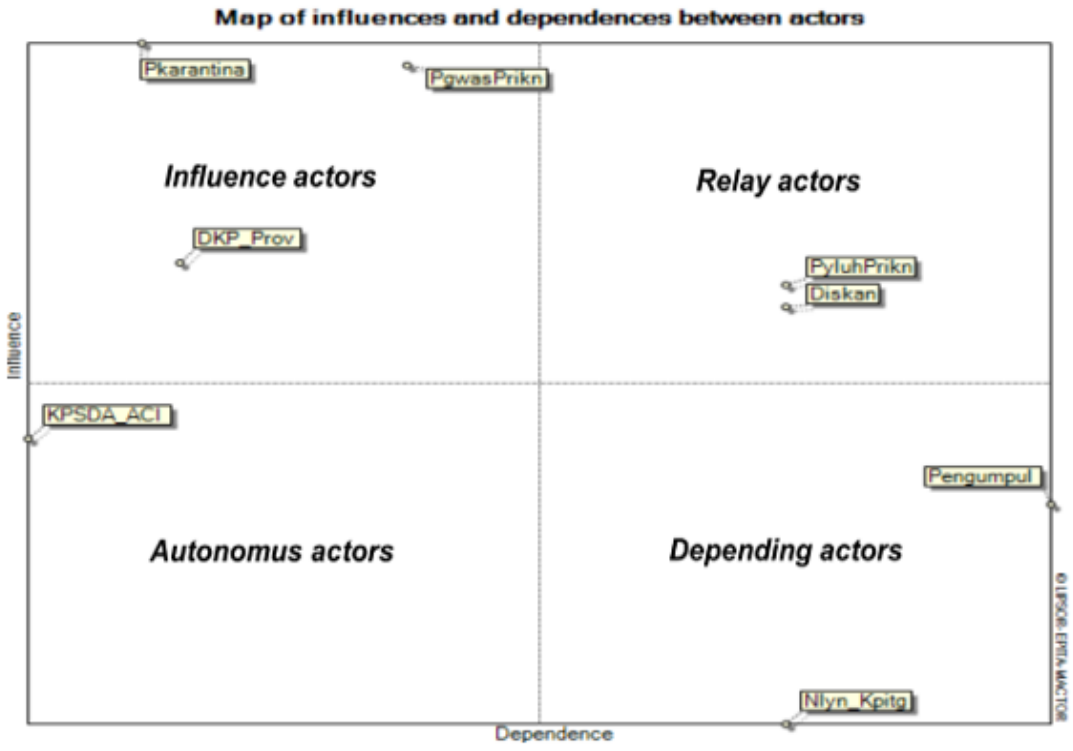
MDII	DKP_Prov	Diskan	PgwasPrikn	PyluhPrikn	Pkarantina	KPSDA_ACI	Pengumpul	Nlyn_Kpitg	Ii
DKP_Prov	12	13	12	13	12	8	13	11	82
Diskan	10	14	11	13	10	10	14	12	80
PgwasPrikn	12	13	13	15	12	10	15	14	91
PyluhPrikn	10	13	12	14	11	10	13	12	81
Pkarantina	13	14	13	14	12	10	15	13	92
KPSDA_ACI	9	11	10	11	9	9	12	12	74
Pengumpul	9	12	10	10	8	10	12	12	71
Nlyn_Kpitg	7	10	8	10	7	8	11	10	61
Di	70	86	76	86	69	66	93	86	632

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

Gambar 2. Hasil MDII Pengelolaan Kepiting Bakau di Kabupaten Sinjai.

Nilai *Ii* menunjukkan tingkat pengaruh bersih setiap aktor terhadap aktor lain, sedangkan nilai *Di* menunjukkan tingkat ketergantungan setiap aktor terhadap sistem. Nilai *Ii* tertinggi dimiliki oleh Pejabat Karantina, kemudian diikuti oleh Pengawas Perikanan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa kedua aktor memiliki kapasitas yang besar dalam memengaruhi pelaksanaan pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai. Pengumpul memiliki nilai *Di* tertinggi, yang menunjukkan tingkat ketergantungan paling besar terhadap pasokan nelayan, kondisi pasar dan kebijakan pemerintah. Posisi tersebut menempatkan pengumpul sebagai aktor yang paling rentan menerima dampak perubahan kebijakan, bukan sebagai aktor yang paling dominan dalam sistem pengelolaan.

Peta pengaruh dan ketergantungan mengelompokkan aktor ke dalam empat kuadran berdasarkan kombinasi tingkat pengaruh dan ketergantungannya (Gambar 3). Pengelompokan tersebut membantu menjelaskan posisi strategis, pola interaksi dan kebutuhan mobilisasi setiap aktor dalam mencapai tujuan pengelolaan (Elmsalmi & Hachicha 2014; Fauzi 2019).



Gambar 3. Peta Pengaruh dan Ketergantungan Antaraktor.

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pengawas Perikanan dan Pejabat Karantina berada pada kuadran I sebagai *influence actors*. Ketiga aktor memiliki pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi mengarahkan kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan sesuai dengan kewenangannya. Pengawas Perikanan menjalankan fungsi pengawasan, pembinaan kepatuhan dan penegakan ketentuan. Pejabat Karantina mengendalikan lalu lintas komoditas berdasarkan persyaratan karantina dan keamanan produk. Posisi tersebut sesuai dengan karakter aktor dominan yang menguasai sumber daya kelembagaan dan mampu menggerakkan perubahan dalam sistem (Omran *et al*., 2014; Píša & Hruška 2024).

Dominasi ketiga aktor tersebut menunjukkan bahwa arah pengelolaan kepiting bakau sangat dipengaruhi oleh lembaga yang memiliki kewenangan formal. Posisi ini memberikan keuntungan karena kebijakan dan pengawasan dapat dijalankan secara lebih terstruktur. Namun, konsentrasi pengaruh pada aktor pemerintah juga menyebabkan keberhasilan implementasi sangat bergantung pada kemampuan mereka membangun koordinasi dengan aktor lain. Apabila koordinasi berjalan kurang efektif, maka kebijakan yang telah dirumuskan berpotensi tidak sepenuhnya diterapkan pada tingkat pemanfaatan. Oleh karena itu, ketiga aktor tersebut tidak hanya berperan sebagai pengendali sistem, tetapi juga sebagai *policy driver* yang menentukan arah dan efektivitas pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai.

Dinas Perikanan Kabupaten dan Penyuluh Perikanan berada pada kuadran II sebagai *relay actors*. Kedua aktor tersebut memiliki tingkat pengaruh dan ketergantungan yang relatif tinggi sehingga berperan sebagai penghubung antara kebijakan dan pelaksanaan di lapangan. Dinas Perikanan Kabupaten menjalankan pemberdayaan nelayan kecil, koordinasi program dan fasilitasi pengelolaan pada tingkat daerah. Penyuluh Perikanan menyampaikan informasi, meningkatkan kapasitas pelaku usaha dan memfasilitasi perubahan perilaku nelayan. Efektivitas kedua aktor tersebut bergantung pada koordinasi dengan aktor dominan serta partisipasi nelayan dan pengumpul. Kannan (2017) menegaskan bahwa *relay actors* mempertahankan kolaborasi dalam sistem yang saling bergantung, sedangkan Kusumawardhani *et al*., (2023) menempatkan aktor pada kuadran ini sebagai pihak strategis dalam menentukan keberhasilan pengelolaan.

Posisi tersebut menunjukkan bahwa Dinas Perikanan Kabupaten dan Penyuluh Perikanan memegang peranan penting dalam menjembatani kesenjangan antara kebijakan dan praktik di lapangan. Keduanya menjadi aktor yang menerjemahkan kebijakan pengelolaan menjadi program, penyuluhan, dan pendampingan yang dapat dipahami oleh nelayan maupun pelaku usaha. Peran ini menjadi penting karena rendahnya pemahaman atau keterbatasan akses informasi sering kali menjadi faktor yang memengaruhi tingkat kepatuhan terhadap kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan.

Pengumpul dan nelayan kepiting berada pada kuadran III sebagai *depending actors*. Kedua aktor tersebut memiliki tingkat ketergantungan tinggi, tetapi tidak mempunyai kewenangan formal yang kuat dalam pengambilan keputusan. Nelayan bergantung pada ketersediaan sumber daya, akses pasar dan dukungan pemerintah. Pengumpul skala kecil di Kabupaten Sinjai bergantung pada pasokan nelayan dan permintaan pengumpul skala besar di Kabupaten Bone. Pengumpul skala besar membeli kepiting dalam jumlah tertentu sesuai dengan standar pasar sehingga memberikan pengaruh tidak langsung terhadap rantai pasok di Kabupaten Sinjai. Posisi tersebut menyebabkan nelayan dan pengumpul menerima dampak langsung dari perubahan kebijakan, mekanisme pengawasan dan kondisi pasar (Wijayanto *et al*., 2022; Kusumawardhani *et al*., 2023).

Meskipun memiliki pengaruh yang relatif rendah, nelayan dan pengumpul merupakan aktor yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan karena keduanya berada pada titik pemanfaatan dan distribusi sumber daya. Ketergantungan yang tinggi menunjukkan bahwa perubahan kebijakan mengenai ukuran tangkap, perlindungan kepiting betina bertelur, maupun pengawasan perdagangan akan langsung memengaruhi aktivitas mereka. Kondisi ini menjelaskan bahwa efektivitas kebijakan tidak hanya bergantung pada aktor yang memiliki kewenangan, tetapi juga pada tingkat penerimaan dan kepatuhan aktor yang menjalankan aktivitas penangkapan dan pemasaran. Pengumpul bahkan berpotensi menjadi titik kritis (*bottleneck actor*) dalam rantai pasok apabila kepentingannya tidak terakomodasi dalam implementasi kebijakan.

KPSDA-ACI berada pada kuadran IV sebagai *autonomous actor* dengan tingkat pengaruh dan ketergantungan yang rendah (Fauzi, 2019; Ariyani *et al*., 2020; Wijayanto *et al*., 2022). Kelompok tersebut tidak memiliki kewenangan formal dalam penetapan kebijakan, tetapi dapat

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

mendukung pengelolaan melalui rehabilitasi mangrove, pendidikan masyarakat, penguatan jejaring sosial dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Mobilisasi aktor otonom dapat memperkuat pencapaian tujuan bersama dalam tata kelola kolaboratif (Vazquez-Brust *et al*., 2020).

Rendahnya pengaruh KPSDA-ACI menunjukkan bahwa peran kelompok masyarakat dalam sistem pengelolaan kepiting bakau masih terbatas pada kegiatan pendukung dan belum terintegrasi secara kuat dalam proses pengambilan keputusan. Padahal, pengalaman kelompok ini dalam rehabilitasi mangrove dan pemberdayaan masyarakat dapat menjadi modal sosial yang penting untuk mendukung implementasi kebijakan. Peningkatan keterlibatan kelompok masyarakat berpotensi memperkuat koordinasi antaraktor sekaligus meningkatkan dukungan terhadap upaya konservasi dan pemanfaatan kepiting bakau secara berkelanjutan.

Sistem pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai berdasarkan hasil konfigurasi dan ketergantungan antaraktor menunjukkan bahwa sistem pengelolaan masih didominasi oleh aktor pemerintah sebagai pemegang kewenangan formal, sedangkan nelayan, pengumpul, dan kelompok masyarakat memiliki ketergantungan yang lebih tinggi terhadap sistem. Struktur tersebut mendukung pelaksanaan fungsi regulasi dan pengawasan, tetapi efektivitas implementasinya tetap bergantung pada kemampuan membangun koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi antaraktor. Hal ini mengindikasikan bahwa penguatan tata kelola kolaboratif menjadi kebutuhan penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai.

Hubungan Aktor dan Tujuan Pengelolaan

Matrix of Actors and Objectives (2MAO) menunjukkan posisi setiap aktor terhadap tujuan pengelolaan melalui skor –4 hingga +4 (Tabel 3). Skor positif menunjukkan dukungan terhadap suatu tujuan, sedangkan skor negatif menunjukkan penolakan. Hasil analisis menunjukkan bahwa sebagian besar aktor memberikan dukungan terhadap tujuan pengelolaan kepiting bakau. Perlindungan habitat memperoleh tingkat dukungan tertinggi, diikuti oleh peningkatan teknologi dan inovasi serta perlindungan sumber daya. Pola tersebut menunjukkan adanya kesamaan kepentingan antaraktor dalam menjaga keberlanjutan ekosistem mangrove dan sumber daya kepiting bakau sebagai dasar keberlanjutan kegiatan perikanan dan ekonomi pesisir. Tingginya dukungan terhadap perlindungan habitat juga mencerminkan pengakuan bersama bahwa kualitas habitat mangrove berperan penting dalam mendukung siklus hidup dan produktivitas kepiting bakau.

Dinas Perikanan Kabupaten dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi memberikan dukungan paling kuat terhadap keseluruhan tujuan pengelolaan, terutama perlindungan sumber daya, perlindungan habitat, penguatan tata kelola, pendidikan dan kebijakan. Temuan tersebut sejalan dengan mandat kedua institusi dalam pengelolaan sumber daya perikanan, pemberdayaan masyarakat pesisir, serta implementasi kebijakan perikanan berkelanjutan. Tingginya dukungan terhadap berbagai tujuan menunjukkan bahwa kedua institusi berperan sebagai aktor utama dalam mendorong integrasi aspek konservasi, pemberdayaan masyarakat, dan penguatan kelembagaan dalam sistem pengelolaan kepiting bakau.

Pengumpul memberikan dukungan terhadap tujuh tujuan pengelolaan, tetapi menolak penguatan kebijakan dan regulasi dengan skor –4. Hasil ini menunjukkan adanya perbedaan kepentingan antara pengumpul dan aktor lainnya terhadap arah penguatan regulasi pengelolaan kepiting bakau. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi lapangan, aktivitas pengumpul sangat bergantung pada kontinuitas pasokan kepiting dari nelayan serta permintaan pasar. Hal ini menunjukkan bahwa pemberian skor negatif terhadap penguatan kebijakan dan regulasi mengindikasikan adanya kekhawatiran bahwa kebijakan yang lebih ketat berpotensi memengaruhi kelancaran pasokan dan aktivitas perdagangan yang selama ini dijalankan. Meskipun demikian, pengumpul tetap memberikan dukungan terhadap tujuan perlindungan habitat, perlindungan sumber daya, peningkatan teknologi, peningkatan pendapatan, pendidikan, keterlibatan pemangku kepentingan, dan tata kelola. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penolakan pengumpul tidak ditujukan pada prinsip pengelolaan berkelanjutan secara keseluruhan, melainkan lebih terkait dengan potensi konsekuensi ekonomi dan operasional yang dapat timbul dari penerapan regulasi yang lebih ketat.

Perbedaan kepentingan yang ditunjukkan oleh pengumpul memiliki implikasi penting terhadap implementasi kebijakan karena kelompok ini menempati posisi strategis dalam rantai pemasaran kepiting bakau. Dalam perspektif tata kelola kolaboratif, perbedaan kepentingan tersebut berpotensi memengaruhi tingkat penerimaan dan efektivitas implementasi kebijakan apabila tidak dikelola dengan baik. Oleh karena itu,

proses penyusunan dan implementasi kebijakan perlu melibatkan pengumpul sebagai bagian dari mekanisme konsultasi dan dialog antarpemangku kepentingan. Pelibatan tersebut dapat membantu membangun kesepahaman mengenai tujuan pengelolaan sekaligus meminimalkan potensi konflik yang muncul akibat perbedaan kepentingan antaraktor.

Mobilisasi Aktor Terhadap Tujuan

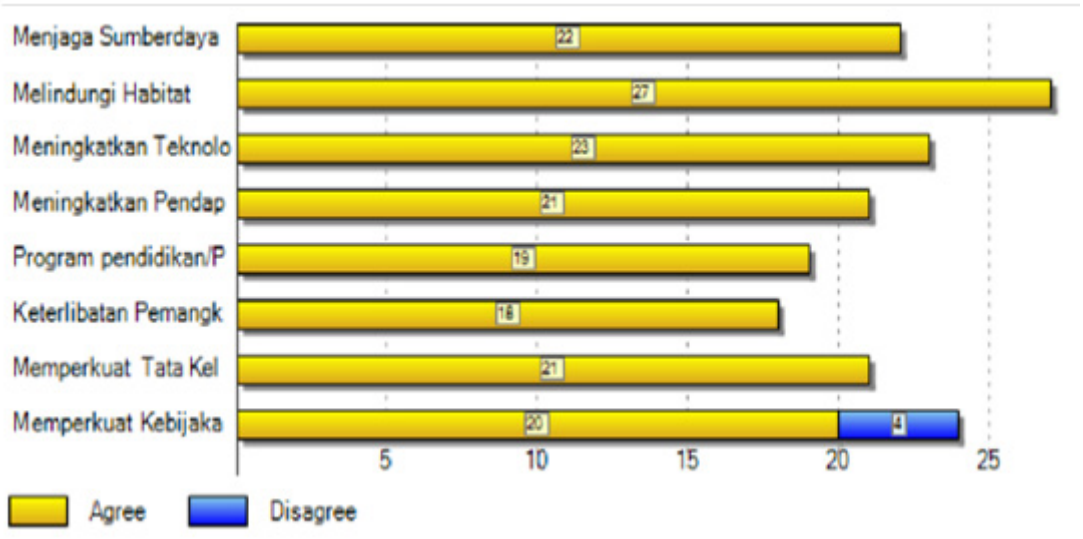
Mobilisasi aktor terhadap tujuan dianalisis berdasarkan matriks 2MAO yang menggambarkan tingkat dukungan dan penolakan terhadap setiap tujuan pengelolaan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar aktor mendukung seluruh tujuan, namun tujuan penguatan kebijakan dan regulasi memperoleh nilai dukungan sebesar 20 dan nilai penolakan sebesar 4 (Gambar 4).

Hal ini menunjukkan bahwa tujuan tersebut tetap memperoleh dukungan mayoritas, tetapi juga menimbulkan resistensi dari salah satu aktor.

Matriks 3MAO membobot posisi dalam matriks 2MAO berdasarkan kekuatan relatif setiap aktor (Gambar 5). Pembobotan tersebut membedakan dukungan yang berasal dari aktor berpengaruh dengan dukungan yang berasal dari aktor yang memiliki kapasitas struktural lebih terbatas. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dan Pejabat Karantina memiliki tingkat mobilisasi tertinggi, sedangkan nelayan kepiting memiliki tingkat mobilisasi terendah. Tujuan perlindungan habitat memperoleh dukungan terbobot terbesar, kemudian diikuti oleh penguatan kebijakan dan regulasi serta peningkatan teknologi dan inovasi. Pola tersebut menunjukkan bahwa para aktor menempatkan perlindungan habitat sebagai prioritas utama dalam pengelolaan kepiting bakau.

Tabel 3. Hasil Pengisian 2MAO *(Matrix of Actor and Actor Objective)*.

Tujuan / Aktor *i*	Sumberdaya	Habitat	Tekno/inov	*Income*	*Education*	*stakeholdr*	Tatakelola	Kebijakan
DKP_Prov	4	4	3	2	2	3	4	4
Diskan	4	4	3	3	4	3	3	3
PgwsPrikn	2	2	2	2	2	1	2	2
PyluhPrikn	2	2	3	2	2	2	1	1
Pkarantina	1	3	4	4	1	1	3	4
KPSDA_ACI	3	4	3	2	2	2	3	4
Pengumpul	2	4	3	4	4	4	3	-4
Nlyn_Kpitg	4	4	2	2	2	2	2	2



Gambar 4. Histogram Mobilisasi Aktor Terhadap Tujuan.

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

3MAO	Sumberdaya	Habitat	Tekno/Inov	Income	Education	Stakeholdr	TataKelola	Kebijakan	Mobilisation
DKP_Prov	4.5	4.5	3.3	2.2	2.2	3.3	4.5	4.5	28.9
Diskan	3.8	3.8	2.8	2.8	3.8	2.8	2.8	2.8	25.3
PgwasPrikn	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5	1.3	2.5	2.5	18.8
PyluhPrikn	1.9	1.9	2.9	1.9	1.9	1.9	1.0	1.0	14.4
Pkarantina	1.3	4.0	5.4	5.4	1.3	1.3	4.0	5.4	28.3
KPSDA_ACI	3.0	4.1	3.0	2.0	2.0	2.0	3.0	4.1	23.3
Pengumpul	1.5	3.0	2.3	3.0	3.0	3.0	2.3	-3.0	21.1
Nlyn_Kpitg	2.5	2.5	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	12.5
Number of agreements	21.0	26.2	23.5	21.1	18.0	17.0	21.3	21.4	
Number of disagreements	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	-3.0	
Degree of mobilisation	21.0	26.2	23.5	21.1	18.0	17.0	21.3	24.4	

© LIPSOR-EPITA-MACTOR

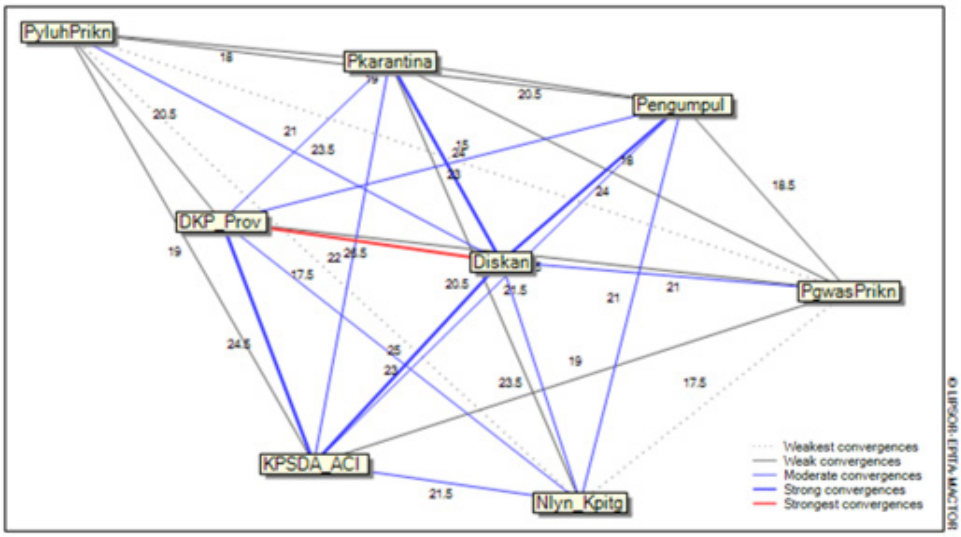
Gambar 5. Matriks Nilai Terbobot Posisi Aktor (3MAO).

Pengumpul memberikan ketidaksetujuan terhadap tujuan penguatan kebijakan dan regulasi. Sikap tersebut menunjukkan bahwa pengumpul memandang pengetatan ukuran tangkap, larangan perdagangan kepiting bertelur dan peningkatan pengawasan sebagai faktor yang berpotensi membatasi pasokan serta keberlanjutan usaha. Meskipun demikian, pengumpul tetap mendukung tujuan pengelolaan lainnya. Oleh karena itu, pemerintah perlu melibatkan pengumpul dalam sosialisasi, perumusan mekanisme pelaksanaan dan pengawasan berbasis rantai pemasaran untuk mengurangi resistensi terhadap penerapan kebijakan.

Konvergensi dan Divergensi Antaraktor

Pemetaan MACTOR menggambarkan tingkat konvergensi dan divergensi antaraktor berdasarkan kesamaan atau perbedaan posisi terhadap tujuan pengelolaan. Konvergensi menunjukkan potensi kerja sama sedangkan divergensi menunjukkan potensi ketidaksepakatan atau konflik. Tingkat konvergensi yang tinggi menunjukkan kesamaan kepentingan yang kuat antaraktor dalam mencapai tujuan pengelolaan (Fauzi 2019).

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi dengan Dinas Perikanan Kabupaten memiliki tingkat konvergensi tertinggi sebesar 26,5 (Gambar 6). Kesamaan posisi tersebut menunjukkan peluang koordinasi dalam perencanaan program, pengawasan pemanfaatan, pemberdayaan nelayan dan perlindungan habitat. Temuan ini sesuai dengan Kusumawardhani *et al.*, (2023) yang menempatkan lembaga pemerintah dengan kewenangan saling melengkapi pada posisi strategis dalam tata kelola perikanan skala kecil. Kondisi di Kabupaten Sinjai memperjelas bahwa keselarasan



Gambar 6. Visual Konvergensi Antaraktor.

tersebut terbentuk melalui pembagian kewenangan antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. Pemerintah provinsi memiliki kewenangan dalam pengelolaan sumber daya perikanan di wilayah laut, sedangkan pemerintah kabupaten menjalankan fungsi pemberdayaan nelayan dan fasilitasi program pada tingkat lokal.

Tingginya tingkat konvergensi antara kedua institusi tersebut menunjukkan adanya fondasi kelembagaan yang kuat untuk membangun koalisi implementasi kebijakan pengelolaan kepiting bakau. Dalam konteks implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang pengelolaan kepiting bakau, kedua aktor dapat berperan sebagai penggerak utama (policy driver) yang mengoordinasikan program pengawasan, penyuluhan, perlindungan habitat, dan peningkatan kepatuhan pelaku usaha. Keselarasan tujuan yang tinggi juga dapat mengurangi risiko tumpang tindih program serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah.

Dinas Perikanan Kabupaten, Pejabat Karantina, KPSDA-ACI dan pengumpul juga menunjukkan tingkat konvergensi yang kuat. Kesamaan kepentingan tersebut membuka peluang kerja sama lintas sektor. Retnoningtyas *et al*., (2021) menyatakan aktor yang memiliki tujuan dan kepentingan yang relatif sama cenderung membangun hubungan kerja sama yang lebih kuat dibandingkan aktor yang memiliki orientasi berbeda. Dinas Perikanan Kabupaten dapat mengoordinasikan program pemberdayaan, Pejabat Karantina dapat mendukung pengendalian lalu lintas komoditas, KPSDA-ACI dapat memperkuat konservasi mangrove dan pendidikan masyarakat, sedangkan pengumpul dapat mendukung pengendalian melalui rantai pemasaran.

Temuan tersebut memiliki implikasi penting bagi strategi implementasi kebijakan. Keterlibatan pengumpul dalam kelompok aktor yang memiliki konvergensi tinggi menunjukkan bahwa pelaku pasar berpotensi menjadi bagian dari solusi, bukan sekadar objek pengaturan. Posisi ini membuka peluang penerapan pendekatan berbasis rantai pasok (*supply chain approach*), misalnya melalui pengawasan ukuran tangkap pada titik pemasaran, penyebarluasan informasi mengenai ketentuan ukuran minimum, dan penguatan mekanisme perdagangan yang mendukung kepatuhan terhadap regulasi. Dengan demikian, pengumpul dapat berfungsi sebagai penghubung antara tujuan konservasi dan kepentingan ekonomi dalam sistem pengelolaan kepiting bakau. Hal ini juga sejalan dengan Vazquez-Brust *et al*., (2020) yang menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif memerlukan keterlibatan pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha.

Kondisi yang membedakan pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai adalah posisi pengumpul yang tetap memiliki peluang kerja sama pada sebagian besar tujuan meskipun menunjukkan perbedaan posisi terhadap penguatan regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaku pasar tidak selalu menjadi penghambat, tetapi dapat menjadi mitra apabila kebijakan mengakomodasi kepentingan ekonomi dan keberlanjutan sumber daya. Holt *et al*., (2019) menyatakan bahwa pelaku rantai pemasaran memiliki peran strategis dalam meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan perikanan karena berinteraksi langsung dengan nelayan dan aliran komoditas.

Penyuluh Perikanan, Pengawas Perikanan, dan nelayan menunjukkan tingkat konvergensi yang relatif rendah. Kondisi tersebut mencerminkan belum sepenuhnya selarasnya fungsi pengawasan, kegiatan penyuluhan, dan kebutuhan ekonomi nelayan. Pengawas Perikanan berorientasi pada kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan nelayan lebih menekankan keberlanjutan pendapatan dan akses terhadap sumber daya. Penyuluh Perikanan juga belum sepenuhnya mampu menjembatani substansi kebijakan dengan kebutuhan praktis nelayan. Temuan ini menunjukkan bahwa salah satu tantangan implementasi kebijakan terletak pada proses komunikasi dan penerjemahan kebijakan di tingkat lapangan.

Implikasi kebijakan dari kondisi tersebut adalah perlunya penguatan fungsi penyuluhan sebagai mekanisme penghubung antara tujuan regulasi dan kebutuhan nelayan. Program penyuluhan tidak hanya perlu berfokus pada penyampaian aturan, tetapi juga pada peningkatan pemahaman mengenai manfaat jangka panjang perlindungan sumber daya dan dampaknya terhadap keberlanjutan usaha penangkapan. Pendekatan tersebut dapat meningkatkan kesamaan persepsi antara nelayan, penyuluh perikanan, dan pengawas perikanan sehingga mendukung kepatuhan terhadap kebijakan yang diterapkan.

Pemetaan divergensi menunjukkan bahwa pengumpul memiliki nilai tertinggi sebesar 24, sedangkan derajat tingkat divergensi keseluruhan mencapai 3,9% (Gambar 7). Nilai tersebut menunjukkan bahwa potensi konflik dalam sistem relatif rendah, tetapi terkonsentrasi pada hubungan antara pengumpul dan beberapa aktor lainnya. Pengumpul memiliki divergensi kuat dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pejabat Karantina

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

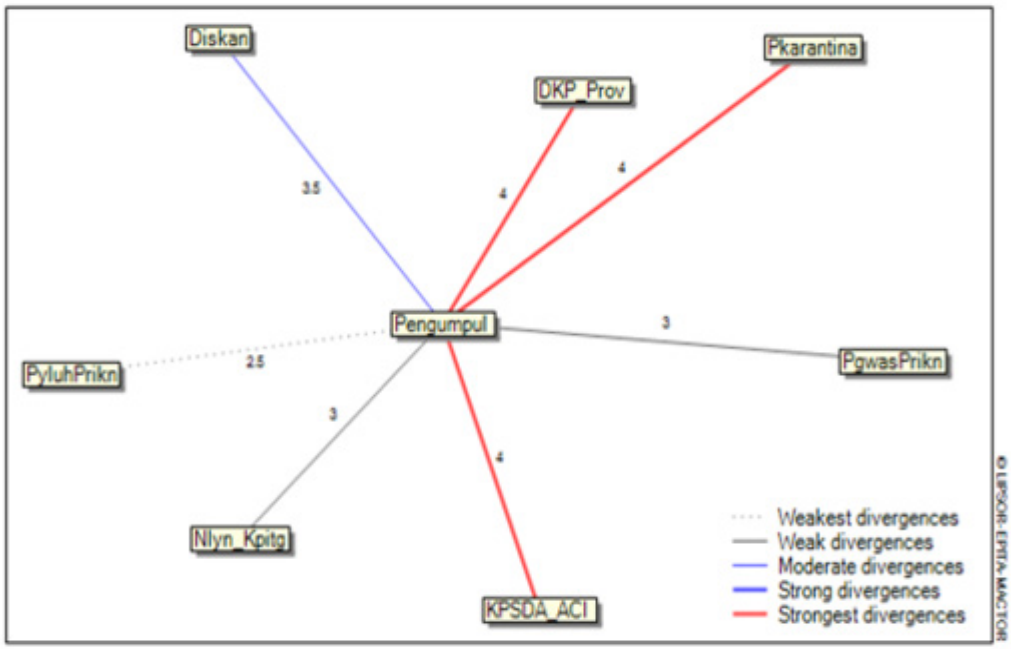
dan KPSDA-ACI. Perbedaan tersebut muncul karena pengumpul berorientasi pada kontinuitas pasokan dan permintaan pasar, sedangkan ketiga aktor lainnya lebih menekankan kepatuhan terhadap regulasi, keberlanjutan stok dan perlindungan habitat.

Pola tersebut sejalan dengan Suryawati *et al*. (2023) dan Parker *et al*., (2024) yang menunjukkan bahwa pelaku pasar umumnya mendukung tujuan keberlanjutan sumber daya, tetapi cenderung menunjukkan resistensi terhadap kebijakan yang berpotensi membatasi pasokan dan aktivitas perdagangan. Pada kasus Kabupaten Sinjai, divergensi yang muncul bersifat selektif karena pengumpul tetap mendukung sebagian besar tujuan pengelolaan dan hanya menunjukkan penolakan terhadap penguatan regulasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa potensi konflik lebih banyak berkaitan dengan mekanisme implementasi kebijakan daripada tujuan keberlanjutan itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut, strategi implementasi kebijakan perlu difokuskan pada pengelolaan divergensi melalui mekanisme konsultasi, dialog, dan negosiasi antaraktor. Pelibatan pengumpul dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dapat meningkatkan penerimaan terhadap regulasi sekaligus mengurangi resistensi yang berpotensi muncul akibat kekhawatiran terhadap dampak ekonomi. Dengan tingkat divergensi sistem yang relatif rendah, penguatan komunikasi dan koordinasi antaraktor berpotensi menghasilkan koalisi implementasi yang lebih solid dalam mendukung pengelolaan kepiting bakau yang berkelanjutan di Kabupaten Sinjai.

Hasil analisis MACTOR menunjukkan bahwa implementasi pengelolaan kepiting bakau di Kabupaten Sinjai lebih ditentukan oleh konfigurasi hubungan antaraktor daripada keberadaan regulasi semata. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi, Pengawas Perikanan, dan Pejabat Karantina memiliki pengaruh tinggi sehingga berperan sebagai policy driver, sedangkan Dinas Perikanan Kabupaten dan Penyuluh Perikanan berfungsi sebagai relay actors yang menjembatani implementasi kebijakan di tingkat lapangan. Nelayan dan pengumpul merupakan aktor yang paling terdampak oleh kebijakan, sementara KPSDA-ACI berperan sebagai pendukung melalui rehabilitasi habitat dan pemberdayaan masyarakat.

Tingginya konvergensi antaraktor menunjukkan bahwa sebagian besar pemangku kepentingan memiliki tujuan yang sama dalam menjaga keberlanjutan kepiting bakau. Divergensi hanya muncul pada penguatan kebijakan dan regulasi, terutama dari pengumpul yang mengkhawatirkan dampak terhadap kontinuitas pasokan. Temuan ini menunjukkan bahwa tantangan utama implementasi kebijakan bukan terletak pada perbedaantujuan, tetapi pada pengelolaan kepentingan antaraktor. Oleh karena itu, pengelolaan kepiting bakau perlu diarahkan pada tata kelola kolaboratif yang mengintegrasikan pemerintah, pelaku usaha, nelayan, dan masyarakat dalam satu mekanisme implementasi kebijakan.



Gambar 7. Visual Divergensi Antaraktor.

IMPLIKASI KEBIJAKAN

Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi serta Dinas Perikanan Kabupaten perlu ditempatkan sebagai policy champion yang mengoordinasikan pengawasan, penyuluhan, perlindungan habitat, dan pemberdayaan nelayan. Pengawas Perikanan dan Pejabat Karantina berperan dalam pengendalian kepatuhan terhadap regulasi, sedangkan Penyuluh Perikanan menjadi penghubung antara kebijakan dan pelaku utama di lapangan. Pengumpul perlu dilibatkan sebagai mitra dalam pengendalian rantai pemasaran agar penerapan regulasi tidak hanya dilakukan pada tahap penangkapan, tetapi juga pada tahap perdagangan.

Prioritas implementasi kebijakan meliputi pembentukan forum koordinasi lintas pemangku kepentingan sebagai langkah jangka pendek, penguatan pengawasan berbasis rantai pasok dan peningkatan kapasitas nelayan pada jangka menengah, serta pengembangan tata kelola kolaboratif yang adaptif pada jangka panjang. Pendekatan ini merupakan nilai tambah penelitian karena menghasilkan dasar empiris untuk menetapkan *policy champion, bottleneck actor*, dan mekanisme koordinasi implementasi kebijakan berdasarkan konfigurasi hubungan antaraktor yang diperoleh melalui analisis MACTOR.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yang telah memberikan dukungan beasiswa tugas belajar dan terima kasih kepada pihak yang berkontribusi dari awal pengambilan data, analisis hingga penyelesaian karya ilmiah ini.

PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini kami menyatakan bahwa kontribusi setiap penulis terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Ahmad Muyassar sebagai kontributor utama serta Fredinan Yulianda, Zairion dan Taryono sebagai kontributor anggota. Pernyataan ini telah kami sepakati secara bersama-sama untuk diketahui semua pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

Alamsyah, R., Liswahyuni, A., Mapparimeng, & Permatasari, A. (2017). Dinamika Populasi Kepiting Bakau (*Scylla spp.*) di Perairan Kabupaten Sinjai. *Biogenesis: Jurnal Ilmiah Biologi*, *5*(2), 111–116. https://doi.org/10.24252/bio.v5i2.3696.

Apine, E., Turner, L. M., Rodwell, L. D., & Bhatta, R. (2019). The Application of The Sustainable Livelihood Approach to Small Scale- Fisheries : The Case of Mud Crab *Scylla serrata* in South West India. *Ocean and Coastal Management*, *170*(September 2018), 17–28. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2018.12.024.

Ariyani, N., Fauzi, A., & Umar, F. (2020). Model Hubungan Aktor Pemangku Kepentingan dalam Pengembangan Potensi Pariwisata Kedung Ombo. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, *23*(2), 357–378. https://doi.org/10.24914/jeb.v23i2.3420.

Bryson, J. M., Quinn, M., & Bowman, R. A. (2011). Working with Evaluation Stakeholders : A Rationale, Step-wise Approach and Toolkit. *Evaluation and Program Planning*, *34*(1), 1–12. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2010.07.001.

Cuinhane, C. J. O., Borges, T. C., Teod, A., & Leit, F. (2024). *Socioeconomic Importance of the Small-Scale Mud Crab Fishing (Scylla Serrata, Forskall 1775) in the Bons Sinais Estuary — Mozambique*.

Dinas Perikanan Kabupaten Sinjai. (2022). Statistik Perikanan Kabupaten Sinjai 2018-2022. DP Sinjai. hal 35 dan 96. (n.d.).

Elmsalmi, M., & Hachicha, W. (2014). Risk Mitigation Strategies According to the Supply Actors' Objectives Through MACTOR Method. *International Conference on Advanced Logistics and Transport Risk*, 401–406.

Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2011). *An Integrative Framework for Collaborative Governance*. *June 2009*, 1–29. https://doi.org/10.1093/jopart/mur011.

Fauzi, A. (2019). *Teknik Analisis Keberlanjutan*. PT. Gramedia Jakarta.

Hikmawati F. (2020). *Metodologi Penelitian* (R. Pers (Ed.)). PT. Rajagrafindo Persada.

Holt, T. Van, Crona, B., & Ka, S. (2019). *Fishery Improvement Projects as a Governance Tool for Fisheries Sustainability : A global comparative analysis*. 1–20.

Kannan, D. (2017). *Role of Multiple Stakeholders and The Critical Success Factor Theory for The Sustainable Supplier Selection Process*. https:// doi.org/ http://dx.doi.org/ 10.1016/j.ijpe.2017.02.020.

Karniati, R., Sulistiyono, N., Amelia, R., Slamet, B., & Bimantara, Y. (2021). *Mangrove Ecosystem in North Sumatran (Indonesia) Forests Serves as a Suitable Habitat for Mud crabs (Scylla serrata and S . olivacea)*. *22*(3), 1489–1496. https://doi.org/10.13057/biodiv/d220353.

Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2023). *Profil Pasar Kepiting. Direktorat Jenderal Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan*.

Kusumawardhani, H. A., Susilowati, I., & Hadiyanto. (2023). Vulnerable Yet Viable: Stakeholders'

p-ISSN: 2089-6980
e-ISSN: 2527-3280

Role in Small-Scale Fishermen Governance Towards Viable Life. *WSEAS Transactions on Environment and Development*, *19*, 207–217. https://doi.org/10.37394/232015.2023.19.18.

Omran, A., Khorish, M., & Saleh, M. (2014). Structural Analysis with Knowledge-Based MICMAC Approach. *International Journal of Computer Applications*, *86*(5), 39–43.

Ostrom, E. (2014). *A General Framework for Analyzing Sustainability of Social-Ecological Social-Ecological Systems*. *419*(2009). https://doi.org/10.1126/science.1172133.

Parker, Q. M., Tsimijaly, H., Long, S., & Jones, P. J. S. (2024). *A Longitudinal Governance Analysis of a Locally Managed Marine Area : Ankobohobo Wetland Small-Scale Mud Crab Fishery, Madagascar*. *163*(September 2023).

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 5 Tahun 2026 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Pengelolaan Lobster (*Panulirus Spp.*), Kepiting (*Scylla Spp.*) dan Rajungan (*Portunus Spp.*).

Píša, J., & Hruška, V. (2024). *Disentangling The ' Capacity to Act ': Variegated Resources of Individuals Exerting Change Agency*. *4313*. https://doi.org/10.1080/09654313. 2023.2258165.

Retnoningtyas, H., Yulianto, I., Soemodinoto, A., Herdiana, Y., Kartawijaya, T., Natsir, M., & Tri, J. (2021). *Stakeholder Participation in Management Planning for Grouper and Snapper Fisheries in West Nusa Tenggara Province, Indonesia*. *128* (February).

Riyanto, M., Wisudo, S. H., Rufiati, I., Fachri, F. R., Septiani, W. D., Inayah, Rukim, M., Ilyas, G. N., de la Rosa, E., & Saputra, R. (2025). Length-Based Stock Assessment of *Scylla serrata* (Forskål, 1775) in Indragiri Hilir, Riau Province, Indonesia. *Egyptian Journal of Aquatic Research*, *51*(2), 217–224. https://doi.org/10.1016/j.ejar.2025.02.004.

Vazquez-Brust, D., Piao, R. S., de Melo, M. F. de S., Yaryd, R. T., & M. Carvalho, M. (2020). The Governance of Collaboration for Sustainable Development: Exploring the "Black Box." *Journal of Cleaner Production*, *256*. https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.120260.

Viswanathan, C., Pravinkumar, M., Suresh, T. V, Elumalai, V., & Raffi, S. M. (2019). *Reproductive Biology of The Orange Mud Crab Scylla olivacea (Herbst , 1796) from The Pichavaram Mangroves of South-East India*. *66*(1), 26–33. https://doi.org/10.21077/ijf.2019.66.1.82235-04.

Wijayanto, Y., Fauzi, A., Rustiadi, E., & Syartinili. (2022). Development of Sustainable Urban Railway Service Model Using Micmac-Mactor: A Case Study in Jabodetabek Mega-Region Indonesia. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, *17*(1), 135–146. https://doi.org/10.18280/ijsdp.170113.

Yunus, M., & Siahainenia, L. (2019). Keterkaitan Karakteristik Habitat dengan Kepadatan Kepiting Bakau pada Ekosistem Mangrove Desa Evu Kecamatan Hoat Soarbay Kabupaten Maluku Tenggara. *TRITON: Jurnal Manajemen Sumberdaya Perairan*, *15*(2), 58–68. https://doi.org/10.30598/tritonvol15issue2page58-68